

ABSTRAK

Pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana prosedur dan perlindungan hukum yang diberikan. Begitu juga dengan notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II apakah dapat melakukan lelang terhadap barang sitaan dan rampasan negara. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta; 2) Menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta.

Pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan model analisa interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan

Hasil penelitian menunjukkan 1) Pelaksanaan lelang eksekusi barang sitaan dan rampasan negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I. Pelaksanaannya, penjual yang akan melakukan penjualan barang secara Lelang harus mengajukan surat permohonan Lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan Lelang yang disertai dengan dokumen yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis lelang yang dimohonkan; 2) Peran notaris dalam pelaksanaan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017 tentang Pejabat Lelang Kelas II yang terbatas pada Lelang Noneksekusi Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada Lelang Barang Milik Badan Usaha Milik Negara Daerah (BUMN/ D) berbentuk persero; Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing; dan Lelang Barang Milik perorangan atau badan usaha Swasta. Notaris tidak dapat melaksanakan lelang yang menjadi kewenangan Pejabat Lelang Kelas I karena terbentur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Lelang Eksekusi, Barang Sitaan dan Rampasan Negara, Peran Notaris

ABSTRACT

The purpose of this study is 1) Analyze the execution of the auction of goods confiscated and confiscated by the Office of State Wealth Service and Auction of Yogyakarta; 2) Analyze the role of notary in the execution of the auction of goods confiscation and confiscation of the state at the Office of State Wealth Service and Auction of Yogyakarta.

The research approach is empirical juridical. This type of research is qualitative. Data source used in the form of primary data and secondary data. Technique of collecting data using interview. Data analysis technique used is descriptif with interactive analysis model from Miles and Huberman consisting of data collecting, data reduction, data presentation, and drawing conclusion

The results of the study show that 1) The execution of the execution of goods confiscated and confiscated by the State Office of Aid and Auction of Yogyakarta shall be executed by Class Auctioneer Office. Implementation, the seller who will conduct the sale of goods at Auction shall submit a letter of application to the Head of KPKNL to request execution schedule An auction accompanied by a designated document in accordance with the type of auction filed; 2) The notary role in the execution of the auction at the Office of State Assets and Auction of Yogyakarta shall be conducted in accordance with the provisions of Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 189 / PMK.06 / 2017 concerning Class II Auction Officers limited to a Voluntary Non-Discipline Auction including but not limited to auction Property Owned by State-Owned Enterprises (SOEs / D) in the form of a company; Auction of a bank's property in liquidation unless specified otherwise by law; Auction of a Foreign Property; and Auction of Individual Property or Private Enterprise. Notary can not execute the auction which is the authority of Class I Auction Office because it violates the prevailing laws and regulations.

Keywords: *Auction Execution, Seized Goods and State Seizures, Notary Roles*